

BAB II

POLEMIK TURKI DAN SWEDIA DALAM KEANGGOTAAN *NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO)*

Bab ini akan membahas mengenai dinamika hubungan Turki dengan Swedia dalam proses pencalonan Swedia sebagai anggota NATO. Bagian ini akan diperinci sesuai dengan perkembangan antara hubungan luar negeri dari kedua Negara tersebut dengan *timeline* permasalahan. Bagian ini juga akan dipecah dalam beberapa sub bab untuk dapat menjelaskan peran Turki dalam keanggotaannya di NATO, serta alasan pengajuan permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO.

2.1 Perkembangan Hubungan Turki dan Swedia

Hubungan diplomatik antara Turki dan Swedia bisa terbilang cukup stabil, tidak banyak berubah pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Turki memilih bergabung dengan NATO pasca Perang Dunia II tepatnya pada 18 Februari 1952. Saat itu Turki dibawah kepemimpinan H.E. Mr Celâl Bayar, melihat perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dapat membahayakan negaranya, mengambil langkah politik untuk bergabung dengan NATO sebagai jaminan keamanan serta memperkuat identitas baratnya (NATO, 2024).

Sementara Swedia mengambil jalannya sendiri dengan memilih untuk tetap netral tidak memihak siapapun baik blok barat maupun blok timur. Swedia juga sudah memiliki reputasi sebagai negara yang mendukung hak asasi manusia secara penuh. Hal itu dilakukan oleh Swedia dalam rangka menghindari aliansi militer yang dapat menyebabkan ketegangan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berangkat dari reputasi

itulah mengapa Swedia tidak pernah mengambil sikap berpihak kepada siapapun. Meskipun begitu, Turki dan Swedia tetap berhubungan baik dan saling menghormati (Government Offices of Sweden, 2024).

Hubungan Turki dan Swedia bisa dikatakan cukup pragmatis, mengingat hubungan kedua negara hanya sebatas hubungan diplomatik yang didasarkan pada keuntungan bersama sebagai tujuan kerjasamanya. Hingga pada tahun 1980 - 1990an, ketika para pengungsi Kurdi mulai mencari suaka di Swedia dan mendapatkan dukungan untuk aktif dalam aktifitas politik serta advokasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Dukungan yang diberikan Swedia kepada para pengungsi Kurdi merupakan penyebab awal memburuknya hubungan antara kedua negara tersebut (Khayati, 2012).

2.1.1 Tuduhan Swedia Kepada Turki terkait Genosida Armenia

Pada Kongres yang dilaksanakan di Washington D.C 10 Oktober 2007 silam, Amerika Serikat meloloskan resolusi terhadap peristiwa yang terjadi antara Armenia dan Turki. Dari voting tersebut, Amerika menganggap bahwa Turki telah melakukan genosida kepada jutaan warga Armenia pada masa Perang Dunia I oleh dinasti Ottoman. Selain Amerika Serikat, Swedia juga menggelar voting yang dilakukan oleh parlemen mereka mengenai genosida Turki terhadap Armenia, dan hasilnya menunjukkan bahwa Turki telah mendukung pembunuhan massal pada tahun 1915 kepada umat kristian Armenia. Namun hal itu disangkal oleh Ankara, mereka menganggap hal itu terlalu mengada-ada, karena angka korban yang diberitakan sebanyak 1.5 juta jiwa tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Turki menerima terkait fakta banyaknya warga Armenia yang terbunuh pada saat

itu, namun mereka menentang hal tersebut jika dikaitkan dengan genosida. Terlebih, pada peristiwa itu banyak warga Turki yang juga menjadi korban dari Armenia (Vilhelmsen, 2010).

Penilaian yang dirasa kurang objektif itu akhirnya membuat Ankara menarik duta besar mereka baik dari Washington maupun Stockholm. Penarikan duta besar terjadi karena Turki menganggap Swedia melakukan tuduhan dengan alasan bahwa mereka merupakan negara sekuler yang mengedepankan hak asasi manusia tanpa tahu sejarahnya. Di sisi lain, beberapa waktu sebelum adanya voting resolusi tersebut, Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan berencana ingin melakukan kunjungan ke Swedia. Akan tetapi, menyusul adanya aksi tuduhan tersebut, Erdogan membatalkan rencananya (RFERL, 2010). Menteri Luar Negeri Swedia, Carl Bildt, menyatakan bahwa voting yang dilakukan oleh negaranya merupakan sebuah kesalahan karena dapat menghambat normalisasi hubungan antara Turki dan Armenia. Akan tetapi, mereka tetap mengadopsi resolusi terkait Genosida Armenia karena sejatinya voting tersebut dilakukan untuk mempromosikan kebenaran terkait Hak Asasi Manusia dan bukan bertujuan menghalangi jalan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Bildt menyatakan pihaknya akan tetap mendukung Turki terkait keanggotaannya di Uni Eropa (Asia News, 2010). Hal inilah yang menjadi bibit permulaan hubungan Turki dan Swedia menjadi tidak baik-baik saja.

2.1.2 Tuduhan Turki Kepada Swedia Terkait Dukungan Organisasi Teroris PKK

Berawal pada Oktober 2019, dimana Turki mengirim konvoi militer ke Timur Laut Suriah dengan tujuan untuk mendirikan zona aman yang dikenal dengan *Operation Peace Spring*. Sebenarnya, pembangunan zona aman ini sudah direncanakan Presiden Erdogan sejak 2017. *Operation Peace Spring* dilakukan seraya Amerika Serikat yang menarik mundur pasukannya dari daerah tersebut pasca penumpasan kelompok ISIS yang dilakukan bersama dengan YPG dan PKK (Butler, 2019). Alih-alih membuat zona aman di wilayah Suriah, Turki justru menyerang YPG yang dianggap Turki sebagai organisasi teroris (Uras, 2019).

Serangan yang dilakukan oleh Turki kepada YPG di Timur Laut Suriah tentunya berdasar. Kekhawatiran akan kelompok YPG dan PKK yang telah lama menimbulkan cukup banyak masalah bagi Turki merupakan alasan mengapa mereka memutuskan menyerang YPG ketika ada kesempatan. YPG yang merupakan afiliasi dari PKK sendiri memiliki sekitar 20 000 hingga 30 000 personel dan bermarkas di Suriah Utara (EUAA, 2020). Sedangkan PKK sendiri memiliki sekitar 4000 hingga 5000 anggotaa dan bermarkas besar di Irak (NCTC, 2022). Jumlah tersebut sangat besar bagi Turki, selain anggotanya yang cukup banyak, mereka juga tersebar di Eropa dan Timur Tengah. Hal tersebut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi keamanan nasional Turki.



Gambar 2. 1 Operasi Militer Turki di Suriah (BBC, 2019)

Gambar di atas merupakan konvoi militer yang dilakukan Turki di daerah Timur Laut Suriah untuk dapat membuat zona aman sepanjang garis perbatasan Turki dan Suriah. Zona aman tersebut nantinya akan digunakan untuk mengevakuasi para pengungsi Suriah sebanyak lebih dari tiga juta jiwa yang telah memasuki Turki sejak 2011 untuk kembali ke Suriah. Hal ini dilakukan karena pengungsi Suriah menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Turki. Alasan hal ini menjadi sumber konflik adalah karena Turki menganggap YPG/PKK lebih berbahaya dari ISIS. Organisasi rakyat Kurdi tersebut memiliki misi dalam terciptanya sebuah wilayah kesatuan Kurdistan di daerah Suriah Utara (Rahman, 2019). Hal ini tentu ditolak oleh Ankara dan Damaskus, yang mana pada 2018 Turki berniat untuk menumpas pasukan YPG namun hal itu tidak direstui Amerika Serikat karena mereka masih membutuhkan YPG sebagai tumpuan serangan melawan ISIS (Ünlühisarcıklı, 2016).

Namun Turki melihat adanya kesempatan setelah Amerika menarik pasukannya dari Suriah, seolah-olah jalan untuk mendirikan zona aman terbuka lebar bagi Turki. Akhirnya pada Oktober 2019, Turki melancarkan serangan kepada YPG di daerah utara Suriah. Alhasil, keputusan yang dilakukan Turki ini mendapat kecaman dari berbagai negara seperti Amerika, Mesir, Prancis, Finlandia dan Swedia. Kecaman yang diberikan oleh negara – negara tersebut berujung kepada pemberlakuan embargo senjata kepada Turki (Pusane, 2020). Berdasarkan respon yang diberikan oleh negara – negara yang mengecam tindakan Turki, penulis berpendapat bahwa pemberlakuan embargo ini sebagai bentuk kekhawatiran akan sumber daya yang didapat dari negara tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, Turki mungkin menganggap Swedia mendukung organisasi teroris PKK karena pemberlakuan embargo oleh Swedia dan status negaranya yang saat itu masih negara sekuler.

Selain tuduhan dukungan Swedia yang berkaitan dengan embargo senjata, Turki juga menuduh Swedia menampung anggota PKK dan memberikan bantuan dana kepada organisasi tersebut. Akan tetapi Swedia membuktikan bahwasannya ada oknum individu yang melakukan hal tersebut, dan individu yang memberikan bantuan dana adalah anggota dari PKK yaitu Yahya Gungor. Hakim dari persidangan yang dilakukan terhadap Gungor, Mans Wigen mengatakan bahwa Gungor melakukan pemerasan kepada seorang pebisnis kurdi untuk memberikan bantuan dana kepada organisasi PKK. Hakim Mans Wigen juga memberikan pernyataan bahwa *“The blackmail attempt has taken place within the framework of*

an extensive fundraising activity that the PKK conducts in Europe, i.e. through extortion” (Reuters, 2023). Beberapa hal tersebut yang kemudian menumbuhkan pandangan Turki terhadap Swedia sebagai pendukung PKK dan memperkeruh hubungan kedua negara.

2.1.3 Penghentian Ekspor Senjata Swedia Kepada Turki

Menyusul serangan yang dilakukan oleh Turki kepada YPG di wilayah Timur Laut Suriah, Swedia yang merupakan negara sekuler tentunya mengecam tindakan tersebut. Selain itu, Swedia juga memberlakukan kebijakan larangan ekspor senjata atau yang kita kenal sebagai embargo senjata ke Turki. Pengambilan langkah embargo oleh Swedia merupakan hal yang sangat penting mengingat hubungan militer serta perdagangan (ekspor impor) antara Turki dan Swedia yang sebelumnya cukup erat. Menurut data yang penulis dapatkan dari Arsip Laporan Nasional Ekspor Senjata Swedia selama tiga tahun terakhir sebelum pemberlakuan embargo, yakni dari 2017 hingga 2019, Turki telah melakukan impor senjata dari Swedia senilai 412 juta SEK. Dimana pada tahun 2017 Turki melakukan impor senjata senilai 71 juta SEK, lalu di tahun 2018 senilai 299 juta SEK, dan Turki sempat melakukan impor senjata senilai 42 juta SEK sebelum pemberlakuan embargo oleh Swedia pada tahun 2019. Berdasarkan data terkait pembelian yang dilakukan pada tahun 2019, Turki telah membeli 3 jenis peralatan persenjataan dari Swedia antara lain *Fire Controll Equipments*, *Electronic Equipments “spacecraft”*, dan *Technology* (Sweden Government Communication, 2020).

Keputusan terkait embargo dilakukan karena penyerangan Turki terhadap YPG dianggap melanggar hukum internasional, kedaulatan negara – negara tetangga, dan memperburuk krisis kemanusiaan yang telah terjadi di wilayah Suriah Utara. Penangguhan ekspor senjata ini tidak hanya dilakukan oleh Swedia saja. Ada beberapa negara yang juga melakukan pembatasan hingga pelarangan ekspor senjata ke Turki, diantaranya adalah Prancis, Jerman, dan Belanda. Swedia melakukan embargo ini atas dasar sebagai negara sekuler yang mendukung Hak Asasi Manusia, dan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil. Mereka yang merupakan negara netral semenjak lama itu, melakukan protes yang kedua kali nya kepada Turki setelah sebelumnya melakukan resolusi terkait genosida yang dilakukan Turki ke Armenia pada tahun 1915 silam. Pelarangan ekspor senjata ini dilakukan oleh Swedia tanpa tenggat waktu yang ditentukan. Penulis melihat kebijakan pelarangan ekspor senjata oleh Swedia kepada Turki ini makin memperburuk hubungan bilateral antar dua negara tersebut.

2.1.4 Isu Agama mengenai Pembakaran Al-Qur'an di Swedia

Isu penistaan agama Islam telah banyak menjadi buah bibir masyarakat Muslim di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, isu tersebut menjadi semakin banyak dan tentunya mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satu peristiwa yang mendapat banyak kecaman dari dunia khususnya umat Muslim adalah peristiwa pembakaran Al-Qur'an. Peristiwa pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh imigran Kristen Irak, Salwan Momika, dilakukan di depan *Central*

Mosque Stockholm. Peristiwa pembakaran Al-Qur'an lain dilakukan oleh Politikus berkebangsaan Swedia – Denmark di luar kantor kedutaan Turki untuk Swedia. Kasus penistaan ini dilakukan di beberapa kota di Swedia termasuk Malmö dan Stockholm (Maharani, 2023).



Gambar 2. 2 Aksi Pembakaran Al-Qur'an oleh Demonstran
(Szumski, 2023)

Aksi Pembakaran Al-Qur'an pada gambar di atas dilakukan oleh Rasmus Paludan yang memiliki kewarganegaraan ganda Denmark – Swedia dan juga pemimpin Partai Sayap Kanan Denmark. Pasalnya, Paludan melakukan aksi pembakaran Al-Qur'an tersebut pada aksi demonstrasi di depan kedutaan Turki untuk Swedia, Stockholm yang diikuti sekitar 200 demonstran (BBC, 2022). Hal tersebut tentu memicu kemarahan bagi seluruh negara Muslim di dunia khususnya Turki. Turki geram dan semakin enggan untuk menerima pencalonan Swedia sebagai anggota baru NATO (Anadolu, 2023). Hal itu dibuktikan dengan

pernyataan oleh Presiden Erdoğan setelah pertemuan kabinet di Ankara yang mengatakan

“Sweden, don’t even bother! As long as you allow my holy book, the Quran, to be burned and torn, and you do so together with your security forces, we will not say ‘yes’ to your entry into NATO” (Fraser, 2023).

Respon Swedia yang seakan-akan membiarkan hal semacam penistaan agama tersebut dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi ini juga tidak masuk akal. Swedia yang menjadi negara paling sekuler dan liberal ini memang memiliki aturan pada undang-undang mereka mengenai kebebasan berekspresi. Nyatanya, otoritas Swedia memberikan izin bagi pelaku pembakaran oleh imigran Irak, serta membungkam atas kejadian pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan oleh kelompok anti-islam Danske Patriotier selama tiga hari berturut-turut (DW, 2023). Kejadian inilah yang juga membuat Turki sebagai negara mayoritas muslim geram dengan Swedia yang dianggap tidak bisa mengendalikan masalah, terlebih kasus ini terjadi di negaranya sendiri (Sorongan & Arbar, 2023). Penulis melihat Swedia yang menjauhkan diri dari masalah ini karena status negara mereka dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, akan tetapi di sisi lain kebebasan berpendapat disini sudah masuk kedalam penistaan agama yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Swedia.

2.2 Peran Turki di NATO

Turki yang telah menjadi anggota NATO selama lebih dari 7 dekade tentunya telah banyak memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi dari awal hingga bisa mencapai kondisi saat ini. Pasca Perang Dunia II kemudian memasuki

periode Perang Dingin, Eropa terbagi menjadi dua blok yaitu blok Timur dan blok Barat. Pada saat itu Turki memilih bergabung dengan blok Barat dan membantu Amerika Serikat melawan ekspansi Soviet. Setelah rekonstruksi ekonomi Eropa pascaperang, Turki akhirnya bergabung dengan NATO pada tahun 1952 (NATO, 2024).

2.2.1 Turki sebagai Kekuatan Independen

NATO yang telah berdiri lebih dari 70 tahun ini memiliki anggota yang sulit untuk tergantikan seperti Turki. Pasalnya, negara tersebut juga sudah cukup lama bergabung di NATO dan memiliki kontribusi yang tidak main-main. Perannya sebagai kekuatan baru yang tidak berada dalam bayang-bayang Amerika dan Russia inilah yang membuat Turki memiliki posisi yang cukup superior dan menjadi kekuatan independen di NATO. Kekuatan Turki baik dari sektor persenjataan serta militer maupun sektor ekonomi yang kuat membuat Turki menjadi negara yang cukup diperhitungkan di dalam tubuh organisasi NATO (U.S. Department of State, 2023). Berdasarkan data dari *Global Firepower* (GFP), kekuatan militer Turki sendiri berada di peringkat 8 dengan *PwrIndx* Score* 0.1697 (GFP, 2024). Sedangkan dalam keanggotaan NATO sendiri, Turki menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat dalam hal kekuatan militer dengan jumlah angkatan bersenjata aktif sebanyak 355.000 pasukan (Davis, 2024).

Kekuatan independen yang dimaksud adalah Turki dapat dikatakan tidak berada dalam sekutu Amerika Serikat maupun pihak Russia. Turki dapat menjadi negara yang solid di segala lini sekalipun tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat maupun Russia. Hal ini dapat dilihat ketika Turki yang menjadi satu-

satunya negara yang melakukan penolakan terhadap pencalonan Swedia di NATO. Turki memiliki persepsi dan pandangan nya sendiri serta dapat mengidentifikasi bibit-bibit konflik secara mandiri.

Turki juga telah menunjukkan kekuatan politiknya dengan memberikan penolakan kepada Swedia terkait permohonan untuk bergabung dengan NATO. Selain itu, Turki juga pernah menempatkan diri sebagai mediator dalam ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Hal itu juga membuktikan bahwa Turki tidak terikat dengan kepentingan Amerika ataupun Rusia, serta dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional negaranya. Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat melihat bahwa Turki memiliki kekuatan yang cukup besar dalam keanggotaanya di NATO.

2.2.2 Turki sebagai Aktor Penyelesaian Konflik Suriah

Turki mengecam keras kekejaman rezim penguasa Suriah dalam menggunakan langkah represif serta senjata biologis terhadap kelompok oposisi Suriah. Langkah yang diambil oleh rezim penguasa Suriah telah menimbulkan kekacauan dan memakan korban warga sipil. Melihat hal tersebut, Turki secara tegas dan jelas menginginkan rezim penguasa Suriah untuk berakhir sesegera mungkin. Keseriusan Turki dalam hal tersebut ditandai dengan penarikan duta besar dan seluruh staf diplomatik Turki dari Suriah (Luerdi, 2016).

Turki yang memiliki visi untuk dapat membuat zona aman di utara Suriah, menjadi aktor penting dalam mengembalikan kondisi negara yang sudah penuh bencana akibat perang saudara tersebut. Banyak hal yang telah dilakukan oleh

Turki sebagai upaya membantu penyelesaian konflik di Suriah. Yang pertama tentunya terkait penerimaan pengungsi dari Suriah. Turki sendiri sudah menampung sekitar 3.6 juta jiwa warga negara Suriah sejak 2011 demi melindungi Hak Asasi Manusia.

Selain terkait isu pengungsi, Turki juga sudah beberapa kali melakukan operasi militer di Suriah yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi disana. Operasi militer pertama dilakukan pada tahun 2016 yang dikenal dengan *Operation Euphrates Shield* dengan tujuan merebut salah satu kota di Suriah yang dikuasai oleh YPG yaitu Kota Jarabulus. Operasi militer kedua dilakukan pada tahun 2018, dikenal dengan *Operation Olive Branch* memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merebut Kota Afrin yang dikuasai oleh YPG. Berkutnya operasi militer ketiga dilakukan pada tahun 2019 yang dikenal dengan *Operation Peace Spring*. Dimana dalam operasi ini, tujuan dari Turki sendiri adalah membuat zona aman di daerah Timur Laut Suriah untuk mengembalikan para pengungsi yang ada di Turki ke negaranya. Operasi militer keempat dilakukan pada tahun 2020, dikenal sebagai *Operation Spring Shield* yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kendali Turki atas wilayah Idlib. Kemudian operasi terakhir dilakukan pada tahun 2022 yang dikenal dengan *Operation Claw-Lock* dengan tujuan untuk menjauhkan kelompok PKK dari perbatasan Turki (Çevik, 2022).

Pasalnya alasan Turki ingin memulangkan para pengungsi ke Suriah adalah jika terus dibiarkan maka hal tersebut dapat menjadi bencana nasional bagi Turki yang pastinya disebabkan karena krisis imigran. Melancarkan serangan ke

YPG/PKK mungkin adalah jalan terbaik yang diambil oleh Turki, karena YPG/PKK dianggap telah menyuarakan pembentukan wilayah kesatuan Kurdistan. Pembentukan wilayah kesatuan Kurdistan tersebut dapat membahayakan bagi Turki maupun Suriah sendiri. Maka dari itu, Turki membuat zona aman yang diperuntukkan bagi warga Suriah yang telah terusir selama bertahun-tahun dari negaranya. Rencananya zona aman tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal bagi sebanyak satu juta warga Suriah yang berada di Turki (MFA, 2024).

2.2.3 Manuver Turki dalam Politik NATO

Turki menjadi negara setelah Amerika Serikat yang memiliki pengaruh cukup kuat dalam perpolitikan di NATO. Ankara terbukti lihai dalam mengendalikan situasi di tubuh NATO. Dapat terlihat pada konflik antara Rusia dan Ukraina, dimana Turki menempatkan dirinya sebagai mediator antar kedua negara. Di satu sisi Turki yang berusaha terus meningkatkan kerjasama bilateral dengan Ukraina, namun di sisi lain Turki harus berhati – hati terhadap respon Rusia. Turki berani menempatkan diri sebagai mediator dan terus meningkatkan kerjasama dengan Ukraina didasari oleh ketergantungan Rusia yang kuat kepada Turki. Dimana ekspor gas Rusia menuju Eropa Timur harus melalui pipa TurkStream yang mengalir dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam (Işık, 2022). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Turki memiliki power serta lihai dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kepentingan nasional maupun keamanan regional.

Contoh lain dan senantiasa akan digunakan dalam penelitian ini ada pada pencalonan Swedia dan Finlandia untuk menjadi anggota NATO. Meski presiden Erdoğan beberapa waktu lalu dengan keras menolak pencalonan negara skandinavia tersebut, namun Ankara melihat bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar pencalonan negara baru tersebut. Yaitu, keamanan seluruh anggota NATO dari segala bentuk ancaman teroris. Dalam situasi ini, Turki memerankan strategi *bargaining* yang cukup menarik. Turki melihat *opportunity* dari segi regulasi pencalonan anggota baru NATO yang mana harus disetujui oleh semua anggota lama. Karena itu, presiden Erdoğan memberikan syarat kepada Swedia jika ingin bergabung menjadi anggota NATO untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu persoalan teroris di negaranya (NPR, 2023). Hal ini juga menunjukkan kepandaian Turki dalam memanfaatkan kekuatan maupun peran yang dimiliki dalam NATO, dimana mereka memanfaatkan kesempatan sebagai faktor penentu bergabungnya Swedia untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya.

2.3 Permohonan Swedia bergabung dengan NATO

Pasca invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina pada Februari 2022, bergabung dengan NATO merupakan langkah yang benar dengan tujuan mencari perlindungan keamanan. Akan tetapi Perdana Menteri Swedia saat itu, Magdalena Andersson menentang gagasan untuk bergabung dengan NATO karena berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasannya. Berkebalikan dengan pernyataan Andersson, Partai Sosial Demokrat miliknya justru mengatakan bahwa bergabung dengan NATO

merupakan langkah yang baik untuk Swedia. Hingga akhirnya pada 18 Mei 2022 Swedia mengajukan permohonan bergabung kepada NATO (AP, 2024).

Dalam pencalonan menuju keanggotaan NATO, Swedia harus mendapat persetujuan dari seluruh negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara tersebut. Norwegia dan Denmark sebagai sesama negara Skandinavia memberikan dukungan penuh terhadap permohonan yang diajukan oleh Swedia. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan bahwa “Hal terkait pencalonan dalam keanggotaan NATO ini merupakan keputusan kalian (Swedia) sendiri. Satu hal yang pasti, jika kalian memutuskan untuk bergabung, maka Denmark akan senantiasa memberikan dukungan penuh” pada *2nd India-Nordic Summit 2022* silam (DW, 2022).

Di sisi lain, permohonan yang diajukan oleh Swedia mendapat penolakan dari salah satu anggota NATO yaitu Turki. Bentuk penolakan dari Turki ini cukup berdasar dan tidak terjadi begitu saja, ada beberapa alasan yang membuat Turki melakukan penolakan terhadap pencalonan tersebut. Dimulai dari hubungan Turki dan Swedia yang telah tertanam bibit-bibit konflik pasca kejadian voting resolusi genosida Armenia yang terjadi pada 1915 silam. Kemudian Swedia yang menampung serta memberikan dukungan kepada anggota PKK di negaranya. Selain itu, Ankara cukup keberatan untuk menerima negara nordik tersebut mengingat Swedia pernah melakukan penghentian penjualan atau embargo senjata sebagai bentuk kecaman saat Turki menyerang YPG di Suriah.

Penulis menilai bahwa permohonan keanggotaan yang diajukan Swedia kepada NATO merupakan langkah yang cukup baik. Mengingat tensi antara Rusia dan Ukraina

yang saat itu semakin memanas, dan untuk mendapatkan perlindungan demi keamanan nasionalnya. Presiden Rusia, Vladimir Putin juga merespon permohonan keanggotaan Swedia di NATO bukan merupakan sebuah ancaman. Akan tetapi, Ia mengatakan bahwa Rusia akan bertindak jika NATO memperkuat infrastruktur militer Swedia (Faulconbridge, 2022).

2.4 Respon Turki Terhadap Permohonan Swedia Untuk Bergabung Dengan NATO

Setelah mengajukan permohonan bergabung kepada NATO, Swedia menghadapi kondisi dimana untuk diterima menjadi anggota NATO, Swedia harus mendapatkan persetujuan dari semua negara anggota NATO. Mengenai hal tersebut, Swedia mendapatkan hambatan yang berupa respon kurang baik dari Turki terkait permohonan keanggotaan nya. Turki dengan tegas menentang permohonan swedia untuk bergabung menjadi anggota NATO, dikarenakan Turki menganggap Swedia telah mendukung kelompok yang dianggap Turki sebagai teroris dan hal tersebut bisa menjadi ancaman jika Swedia menjadi anggota NATO (CNN Indonesia, 2023).



Gambar 2. 3 NATO Summit in Madrid (NATO, 2022)

Gambar di atas merupakan *NATO Summit* yang diadakan di Madrid, Spanyol pada 28 Juni 2022. Salah satu tujuan diadakannya *NATO Summit* tersebut adalah untuk secara resmi mengundang Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Dalam prosesnya, dari total 30 anggota NATO, 28 anggota menyetujui bergabungnya kedua negara tersebut untuk menjadi anggota NATO. Sedangkan dua negara lain yaitu Turki dan Hungaria, menunjukkan sikap yang berbeda dengan anggota lain terhadap aksesinya kedua negara tersebut (Archick, 2024). Dimana pada pertemuan tersebut Presiden Erdogan menyatakan penolakan terkait permohonan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Penolakan tersebut dilakukan karena Turki khawatir jika NATO memiliki anggota yang melindungi atau mendukung organisasi teroris. Selain itu, peristiwa penistaan agama juga menjadi alasan Turki untuk menolak Swedia dalam langkahnya bergabung ke NATO. Turki menganggap negara nordik tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya sendiri. Berdasarkan alasan yang telah

diberikan Turki, penulis merasa keputusan awal bagi Turki untuk menolak pencalonan Swedia yang ingin bergabung dengan NATO merupakan keputusan yang tepat.

Turki yang awalnya menolak kedatangan Swedia, seiring berjalannya waktu semakin memberikan respon yang kian baik untuk negara nordik tersebut. Pasalnya, alasan permohonan yang dibuat cukup masuk akal dan berhubungan dengan stabilitas keamanan negara-negara di Eropa. Meski sejarah hubungan mereka yang kurang begitu baik, namun Turki melihat hal ini sebagai langkah untuk memperkuat posisinya di NATO, sampai-sampai Turki memberikan syarat kepada Swedia untuk menjadi anggota baru NATO. Syarat yang diberikan Turki pun juga masih terbilang masuk akal. Karena jika ditarik kesimpulannya, kepentingan Turki yang ingin memberantas PKK terlihat sejalan dengan negara Swedia yang merasa terancam dengan invasi Russia (Spicer, 2023).

Turki tidak semudah itu untuk memberikan lampu hijau bagi Swedia, karena bagi Turki, ada beberapa persyaratan yang menurut mereka harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan dari Turki. Syarat pertama terkait Swedia yang menampung serta memberikan dukungan kepada kelompok PKK di negaranya, Turki meminta Swedia menandatangani perjanjian untuk melawan kelompok PKK. Syarat berikutnya yang berkaitan dengan dukungan terhadap PKK, Turki meminta Swedia untuk mengekstradisi individu yang merupakan dianggap sebagai anggota PKK di negaranya. Kemudian syarat terakhir berhubungan dengan embargo senjata yang dilakukan oleh Swedia pasca penyerangan Turki di Suriah Utara, Turki meminta Swedia untuk mencabut embargo tersebut (Hayatsever & Spicer, 2024).